

---

**TINJAUAN ATAS AKUNTANSI PAJAK TANGGUHAN PADA PT KAI  
(PERSERO) KANTOR PUSAT BANDUNG****Abdurokhim**

Syntax Corporation Indonesia Cirebon Jawa Barat, Indonesia

E-mail: abdu.ocim@gmail.com

---

Diterima:

**7 April 2020**

Direvisi:

**6 Mei 2020**

Disetujui:

**11 Juni 2020****Abstrak**

Masalah utama perlakuan akuntansi pajak penghasilan adalah bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang untuk pemulihan nilai tercatat aset dan kewajiban. Serta transaksi kejadian lainnya pada periode berjalan yang diakui pada laporan keuangan perusahaan. Pengakuan ini mengharuskan perusahaan mengakui aset dan kewajiban pajak tangguhan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengakuan awal, pengukuran, pencatatan dan penyajian pajak tangguhan dalam laporan keuangan PT. KAI (Persero) Kantor Pusat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilaksanakan di PT. KAI (Persero) yang beralamatkan di Jl. Perintis Kemerdekaan No.1 Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. KAI (Persero) telah melakukan pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian aset pajak tangguhan telah sinkron dengan PSAK No. 46 dan buku teori khususnya tentang akuntansi retribusi honorarium

**Kata Kunci:** *Aset Pajak Tangguhan; Beda Tetap; Beda Temporer; Rugi Fiskal*

**Abstract**

*The main problem of the treatment of income tax accounting is how to account for the tax consequences in the current period and the future period for the recovery of the carrying value of assets and liabilities. As well as other transaction events in the current period recognized on the company's financial statements. This recognition requires the company to recognize deferred tax assets and liabilities. The purpose of this research is to know the initial recognition, measurement, recording and presentation of deferred taxes in the financial statements of PT KAI (Persero) Head Office. The research methods used in this research are library research and field research. This research was conducted at PT. KAI (Persero) which is located at Jl. Perintis Kemerdekaan No.1 Bandung. The results of this study show that PT. KAI (Persero) has conducted recognition, measurement, recording, and presentation of tax assets deferred expired in accordance with PSAK No. 46 and the theory book, especially on income tax accounting.*

**Keywords:** *Deferred Tax Assets; Fixed Differences; Temporary Differences; Fiscal Loss*

## **Pendahuluan**

Sumber penerimaan Indonesia diperoleh dengan pinjaman luar negeri dan sektor dalam negeri (Rangkuty & Sari, 2019). Penerimaan dalam kawasan yang sangat diharapkan untuk mengurangi pinjaman luar negeri adalah peningkatan di sektor perpajakan (Satrianto, 2016). Sumber penerimaan negara di sektor perpajakan memiliki beberapa macam (Tanuwijaya & Budiono, 2014). Salah satunya yaitu retribusi honorarium badan (PPh Badan), yaitu retribusi honorarium yang dikenakan bagi sebuah badan usaha atas penghasilan atau laba usahanya baik itu beroperasi dalam negeri ataupun luar negeri. Salah satu kewajiban wajib pajak badan sesuai dengan UU Nomor 16 tahun 2009 adalah melakukan pembukuan sebagai suatu proses yang dibuat dengan berkala untuk menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan rugi laba dan komprehensif, laporan perubahan modal dan laporan arus kas (Undang Undang, 2009).

Dalam pembuatan laporan finansial, perusahaan diharuskan agar sesuai landasan akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) guna menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK lebih dikenal dengan Laporan Keuangan Komersil yang mengharuskan wajib pajak melakukan rekonsiliasi fiskal guna memenuhi kebutuhan untuk pelaporan pajak satu periode (Pratiwi, 2019).

Seiring berkembangnya dunia akuntansi dan perpajakan, berbagai peraturan yang terbaru pun diterapkan agar bisa berjalan dengan baik. PSAK No.46 merupakan peraturan standar akuntansi keuangan yang mengatur perbedaan sudut pandang berdasarkan akuntansi dan perpajakan guna menghitung baik itu pajak kini maupun masa depan. Dalam konsekuensi ini terdapat adanya pajak tanggahan yaitu pajak yang ditunda sampai waktu yang ditentukan dan adanya perbedaan pengakuan.

Masalah utama perlakuan akuntansi pajak penghasilan adalah bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang untuk pemulihan nilai tercatat aset dan kewajiban. Serta transaksi kejadian lainnya pada periode berjalan yang diakui pada laporan keuangan perusahaan. Pengakuan ini mengharuskan perusahaan mengakui aset serta tanggungan retribusi (Samsi & Sulistyowati, 2020).

Pengidentifikasi peristiwa ekonomi perusahaan haruslah relevan dan andal yang mencerminkan kondisi perusahaan. Pencatatan terdiri dari pembukuan sistematis, catatan bukti secara periodik serta pengukuran informasi yang bersifat kuantitatif. Hasil dari pengidentifikasi dan pencatatan harus dikomunikasikan dan disajikan yang biasa disebut laporan keuangan (Weygandt *et al.*, 2013).

Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang fungsinya adalah untuk menyediakan informasi kuantitatif, terutama informasi yang berkaitan dengan peristiwa ekonomi suatu entitas yang bertujuan untuk pengambilan keputusan diantara berbagai alternatif yang tersedia dalam laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Agoes *et al.*, 2013). Agar akuntansi dapat menghasilkan informasi keuangan, diperlukan adanya suatu metode pencatatan, penggolongan, analisis, pengendalian transaksi kegiatan keuangan, dan pelaporan keuangan perusahaan. Sehingga dapat diperoleh informasi ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh manajemen (Waluyo, 2014).

Laporan keuangan adalah laporan dari transaksi ekonomi dan keuangan perusahaan selama satu periode tertentu yang umumnya satu tahun. Laporan keuangan untuk tujuan umum merupakan pusat dari akuntansi keuangan (Weygandt *et al.*, 2013). Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan

sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (Yocelyn & Christiawan, 2012). Pada prinsipnya laporan keuangan perpajakan adalah sama dengan laporan keuangan komersial. Hanya saja pada laporan keuangan perpajakan ada koreksi-koreksi yang dilakukan terhadap laporan keuangan komersial yang sesuai dengan kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah (Widiastuti & Chusniah, 2011).

Perusahaan dalam mengungkapkan laba bersih dalam laporan keuangan memiliki dua jenis, yaitu menurut akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan. Perbedaan antara dasar komersil dengan dasar pengenaan pajak disebut perbedaan temporer. Perbedaan temporer akan menimbulkan pajak tangguhan yang terdiri dari aset pajak tangguhan (*deffered tax aset*) dan kewajiban pajak tangguhan (*deffered tax liabilities*) (Hakim & Praptoyo, 2015). Selain perbedaan temporer yang menimbulkan aset pajak tangguhan, kewajiban pajak tangguhan timbul apabila perbedaan temporer yang menyebabkan terjadinya koreksi negatif sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih besar daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan (Fitriany *et al*, 2016).

Menurut PSAK No.46 menjelaskan tentang pengukuran sebagai berikut: liabilitas (*asset*) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada (direstitusi) dari otoritas perpajakan yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Anggraeni, 2012) dengan judul Tinjauan atas Penerapan PSAK No. 16 tentang Aset Tetap pada PT. KAI (Persero) Kantor Pusat Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap di PT. KAI (Persero) kantor pusat Bandung. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap di PT. KAI (Persero) Bandung, telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 tentang Aset Tetap. Metode penyusutan yang digunakan PT. KAI (Persero) yaitu menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini penulis meninjau perlakuan akuntansi pajak penghasilan di PT KAI (Persero) Kantor Pusat Bandung berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.46 tentang pajak penghasilan, khususnya pajak tangguhan pada *asset* tetap. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengakuan awal, pengukuran, pencatatan dan penyajian pajak tangguhan berisi informasi finansial PT KAI (Persero) Kantor pusat.

Penelitian ini penting untuk dilakukan untuk mengetahui bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang untuk pemulihan nilai tercatat aset dan kewajiban.

### **Metode Penelitian**

Metode observasi yang dipakai adalah penelitian perpustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian perpustakaan, penulis mempelajari teori-teori yang terdapat dalam buku-buku, catatan-catatan, dan bacaan lainnya untuk mengetahui lebih dalam mengenai teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan, penelitian lapangan yaitu penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa staf di PT. KAI (Persero) yang berhubungan langsung dengan data yang akan dijadikan acuan bagi penelitian ini.

Penelitian ini dilaksanakan di PT. KAI (Persero) yang beralamatkan di Jl. Perintis Kemerdekaan No.1 Bandung. Program magang dilaksanakan sejak tanggal 11 januari 2018 dan berakhir pada tanggal 11 april 2018.

## Hasil dan Pembahasan

PT. KAI (Persero) mengakui aset pajak tangguhan dari seluruh perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan kewajiban dengan dasar pengenaan pajak dengan hasil akhir yang menunjukkan bahwa adanya aset pajak tangguhan pada tahun berikutnya yang harus diselesaikan. Dalam hal ini, penulis akan membahas prosedur dalam aset pajak tangguhan yang dimiliki oleh PT. KAI (Persero) sebagai wajib pajak badan untuk memperlakukan konsekuensi perpajakan agar sama dengan perlakuan akuntansi perpajakan.

### A. Rekonsiliasi Fiskal pada PT. KAI (Persero)

Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan (Ernawati & Tjahjono, 2018).

Pada periode berjalan 31 Desember 2016 perusahaan mengalami rugi sebelum pajak sebesar **Rp 934.643.018**. setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal, maka rugi yang diakui dalam perpajakan menjadi **Rp 529.382.213**. dalam kasus PT. KAI (Persero), rugi yang disajikan dalam laporan laba rugi menjadi berkurang sebesar **Rp 405.260.805**. Dibawah ini merupakan rekonsiliasi fiskal pada PT. KAI (Persero) terhadap laporan laba rugi komersial sebagai berikut:

Tabel 1. Perhitungan laba (rugi) fiskal

<b>PT. KAI (PERSERO)</b>				
<b>Perhitungan Laba (Rugi) Fiskal</b>				
<b>Periode 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015</b>				
	<b>2016</b>		<b>2015</b>	
<b>Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan</b>	<b>Rp (934,643,018)</b>		<b>Rp 1,139,585,534</b>	
<b>Beda Temporer</b>				
Penyusutan Aset Tetap	Rp	-	Rp	-
Imbalan Kerja	Rp	169,010,954	Rp	138,338,120
Pembayaran Imbalan Kerja	Rp	(13,686,000)	Rp	-
Penyusutan Bahan Bakar	Rp	166,558,712	Rp	-
Pembayaran Bahan Bakar	Rp	(369,819,790)	Rp	(161,540,658)
<b>Total Beda Temporer</b>	<b>Rp</b>	<b>(47,936,124)</b>	<b>Rp</b>	<b>(23,202,538)</b>
<b>Beda Tetap</b>				
Biaya Operasional Lainnya	Rp	41,224,000	Rp	792,242,723
THR & bonus	Rp	-	Rp	2,710,180
Biaya Seragam	Rp	4,500,000	Rp	-
Biaya Kesejahteraan Karyawan	Rp	38,202,960	Rp	3,662,700
Biaya Perbaikan dan pemeliharaan	Rp	-	Rp	5,309,400
Biaya Telekomunikasi	Rp	14,323,165	Rp	10,666,389
Biaya Rekreasi	Rp	17,294,000	Rp	20,389,700
Biaya Hiburan	Rp	-	Rp	661,210
Sumbangan	Rp	3,240,000	Rp	39,549,863
Biaya Lainnya	Rp	408,548,243	Rp	375,346,663
Biaya Penghapusan Piutang Tak Tertagih	Rp	-	Rp	104,871,540
Pendapatan Lainnya	Rp	(56,582,783)	Rp	(423,504,155)
Pendapatan Bunga	Rp	(1,594,323)	Rp	(702,265)

Keuntungan atas Penjualan Aset Tetap	Rp	(15,958,333)	Rp	-
<b>Total Beda Tetap</b>	<b>Rp</b>	<b>453,196,929</b>	<b>Rp</b>	<b>931,203,948</b>
<b>Laba (Rugi) Fiskal</b>	<b>Rp</b>	<b>(529,382,213)</b>	<b>Rp</b>	<b>2,047,586,944</b>
<b>Kompensasi Kerugian 2014</b>	Rp	-	Rp	(361,946,108)

### B. Pengakuan Aset Pajak Tangguhan Pada PT. KAI (Persero)

Dari data pada tabel 2 perhitungan aset pajak tangguhan berupa pergerakannya selama tahun berjalan. Besarnya pajak tangguhan dibandingkan dengan saldo awalnya dan diperoleh beban (manfaat) pajak tangguhan pada PT. KAI (Persero). Manfaat pajak tangguhan sebesar Rp 92.784.424 akan disajikan dalam laporan laba rugi tahun berjalan PT. KAI (Persero) sebagai akun manfaat pajak tangguhan. Sedangkan aset pajak tangguhan sebesar Rp 89.821.640 akan disajikan pada laporan posisi keuangan PT. KAI (Persero) sebagai aset atas konsekuensi pajak yang dapat dipulihkan atau diselesaikan untuk pajak masa depan.

Dalam hal ini, perbedaan temporer di PT. KAI (Persero) telah menimbulkan adanya aset pajak tangguhan yang dihitung sebagai berikut:

Tabel 2. Mutasi Aset Pajak Tangguhan

Keterangan	Saldo Awal	Dibebankan ke Laba Rugi	Dibebankan ke Laba Rugi Komprehensif	Saldo Akhir
<b>31 Desember 2016</b>				
Rugi Fiskal	Rp -	Rp 132,345,554	Rp -	Rp 132,345,554
Imbalan Kerja	Rp 26,457,187	Rp 38,831,239	Rp (29,419,971)	Rp 35,868,455
Sewa Pembiayaan	Rp -	Rp (78,392,368)	Rp -	Rp (78,392,368)
	<b>Rp 26,457,187</b>	<b>Rp 92,784,425</b>	<b>Rp (29,419,971)</b>	<b>Rp 89,821,641</b>
<b>31 Desember 2015</b>				
Rugi Fiskal	Rp 90,486,527	Rp (90,486,527)	Rp -	Rp -
Imbalan Kerja	Rp 18,399,672	Rp 34,584,530	Rp (26,527,016)	Rp 26,457,186
Sewa Pembiayaan	Rp 47,222,140	Rp (47,222,140)	Rp -	Rp -
Aset Tetap	Rp (388,936,368)	Rp 388,936,368	Rp -	Rp -
	<b>Rp (232,828,029)</b>	<b>Rp 285,812,231</b>	<b>Rp (26,527,016)</b>	<b>Rp 26,457,186</b>

Perbedaan temporer pada PT. KAI (Persero) timbul dikarenakan oleh beberapa komponen sebagai berikut:

a) Kompensasi kerugian fiskal

Istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian komersial. Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang telah memperhitungkan ketentuan Pajak Penghasilan (Kurniasih & Sari, 2013)

Dalam hal ini, PT. KAI (Persero) mempunyai kompensasi yang muncul atas perhitungan laba fiskal yang dapat diperhitungkan atau diselesaikan untuk pajak masa depan sesuai masa yang diberlakukan oleh Undang-Undang Perpajakan sebesar Rp 529.382.213.

b) Imbalan Kerja

Dalam hal ini, PT. KAI (Persero) mempunyai pesangon yang akan diberikan kepada karyawannya atas jasa yang telah diberikan dan pembayaran pesangon atas

karyawan yang telah menyelesaikan pekerjaannya, sehingga masih berbentuk kewajiban imbalan pasca kerja Rp 169.010.954 dan Rp 13.686.000.

### C. Pengukuran Aset Pajak Tanggungan Pada PT. KAI

Aset pajak tanggungan berpengaruh terhadap manajemen laba, beban pajak tanggungan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, dan Aset pajak tanggungan dan beban pajak tanggungan secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen laba. (Timuriana & Muhamad, 2015)

Dalam hal ini, aset pajak tanggungan dihitung dengan mengalihkan antara dasar pengenaan pajak dengan tarif (*single rate*) tahun 2010 (perubahan terakhir) sebesar 25% tanpa memperhatikan peredaran bruto. Tarif tersebut khusus untuk menentukan aset pajak tanggungan agar tidak menimbulkan kompleksitas terkait kewajiban saldo aset pajak tanggungan. Dalam perhitungan tersebut, tarif yang diterapkan tidak memperhatikan peredaran bruto entitas karena akan menimbulkan kompleksitas PT. KAI (Persero) menyajikan aset pajak tanggungan yang timbul karena perbedaan temporer dari beberapa komponen yaitu kompensasi kerugian fiskal, imbalan kerja, dan sewa pembiayaan. Pengukuran aset pajak tanggungan disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak

Keterangan	Dasar Menurut Komersial	Dasar Menurut Fiskal	Beda Temporer	Tarif	Manfaat (Beban) Pajak Tanggungan
<b>Dibebankan di laba rugi</b>					
Kompensasi Kerugian Fiskal	Rp 529,382,215	Rp	- Rp 529,382,215	25%	Rp 132,345,554
Beban Imbalan Kerja Utang	Rp 155,324,954	Rp	- Rp 155,324,954	25%	Rp 38,831,239
	Rp 1,207,780,908	Rp	- Rp 1,207,780,908	25%	Rp 301,945,227
<b>Total dibebankan di laba rugi</b>					<b>Rp 473,122,020</b>
<b>Dibebankan di Penghasilan Komprehensif</b>					
Penyesuaian Imbalan Kerja	Rp (177,679,882)	Rp	- Rp (177,679,882)	25%	Rp (29,419,971)
<b>Total Dibebankan di Penghasilan Komprehensif</b>					<b>Rp (29,419,971)</b>

Kompensasi kerugian fiskal diukur dengan tarif 25% setelah menghitung laba kena pajak dan diakui sebagai aset pajak tanggungan yang bisa dipulihkan atau diselesaikan di masa depan. Imbalan kerja diukur sebesar kewajiban yang dicadangkan dengan menghitung berdasarkan perhitungan jasa independen aktuaris. Sewa guna usaha yang diukur dengan mengalihkan antara tarif 25% dengan utang sewa guna usaha dan penyusutan aset sewa guna usaha pada periode berjalan.

### D. Pencatatan Atas Aset Pajak Tanggungan Pada PT. KAI (Persero)

Manfaat pajak tanggungan sebesar Rp 92.784.424 akan disajikan dalam laporan laba rugi tahun berjalan PT. KAI (Persero) sebagai akun manfaat pajak tanggungan. Sedangkan aset pajak tanggungan sebesar Rp.89.821.640 akan disajikan pada laporan posisi keuangan PT. KAI (Persero) sebagai aset atas konsekuensi pajak yang dapat dipulihkan atau diselesaikan untuk pajak masa depan. Sehingga jurnal untuk mencatat timbulnya manfaat pajak tanggungan sebagai berikut:

Tabel 4. Pencatatan Pajak Tangguhan

Akun	Debet	Kredit
Beban Pajak Tangguhan (Komprehensif Lainnya)	Rp 29,419,471	
Aset Pajak Tangguhan	Rp 89,821,640	
Manfaat Pajak Tangguhan		Rp 92,784,424

Dalam analisis dan penelitian yang penulis lakukan pada PT. KAI (Persero) khususnya tentang akuntansi pajak penghasilan, bertujuan untuk menghitung konsekuensi pajak kini dan masa depan atas pemulihan (penyelesaian) masa depan jumlah tercatat aset (liabilitas) dalam laporan keuangan dan transaksi (peristiwa) yang terjadi pada laporan keuangan.

a) Rugi fiskal tersedia untuk dikompensasi

Pada akhir periode pelaporan, PT. KAI (Persero) menghitung laba kena pajak tahun berjalan serta melakukan penyesuaian koreksi positif dan negatif. Berikut perhitungan laba kena pajak disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Perhitungan Laba Kena Pajak

PT. KAI (PERSERO)		
Perhitungan Laba (Rugi) Fiskal		
Periode 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015		
	2016	2015
<b>Labanya (rugi) sebelum pajak penghasilan</b>	<b>Rp (934,643,018)</b>	<b>Rp 1,139,585,534</b>
<b>Beda Temporer</b>		
Penyusutan Aset Tetap	Rp -	Rp -
Imbalan Kerja	Rp 169,010,954	Rp 138,338,120
Pembayaran Imbalan Kerja	Rp (13,686,000)	Rp -
Penyusutan Bahan Bakar	Rp 166,558,712	Rp -
Pembayaran Bahan Bakar	Rp (369,819,790)	Rp (161,540,658)
<b>Total Beda Temporer</b>	<b>Rp (47,936,124)</b>	<b>Rp (23,202,538)</b>
<b>Beda Tetap</b>		
Biaya Operasional Lainnya	Rp 41,224,000	Rp 792,242,723
THR & bonus	Rp -	Rp 2,710,180
Biaya Seragam	Rp 4,500,000	Rp -
Biaya Kesejahteraan Karyawan	Rp 38,202,960	Rp 3,662,700
Biaya Perbaikan dan pemeliharaan	Rp -	Rp 5,309,400
Biaya Telekomunikasi	Rp 14,323,165	Rp 10,666,389
Biaya Rekreasi	Rp 17,294,000	Rp 20,389,700
Biaya Hiburan	Rp -	Rp 661,210
Sumbangan	Rp 3,240,000	Rp 39,549,863
Biaya Lainnya	Rp 408,548,243	Rp 375,346,663
Biaya Penghapusan Piutang Tak Tertagih	Rp -	Rp 104,871,540
Pendapatan Lainnya	Rp (56,582,783)	Rp (423,504,155)
Pendapatan Bunga	Rp (1,594,323)	Rp (702,265)
Keuntungan atas Penjualan Aset Tetap	Rp (15,958,333)	Rp -
<b>Total Beda Tetap</b>	<b>Rp 453,196,929</b>	<b>Rp 931,203,948</b>
<b>Labanya (Rugi) Fiskal</b>	<b>Rp (529,382,213)</b>	<b>Rp 2,047,586,944</b>
<b>Kompensasi Kerugian 2014</b>	Rp -	<b>Rp (361,946,108)</b>

Laba (Rugi) Fiskal	Rp (529,382,213)	Rp 1,685,640,836
Laba (Rugi) Fiskal Pembulatan	Rp (529,382,000)	Rp 1,685,640,000

b) Imbalan Kerja

Peraturan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 memaksa perusahaan untuk mencadangkan saldo imbalan kerja untuk pegawai apabila pegawai sudah berhenti ataupun pensiun. Sejalan dengan hal ini, PT. KAI (Persero) menerapkan dasar akrual sehingga mencadangkan lebih awal imbalan kerja atas pegawai dengan dasar perhitungan yang dilakukan oleh jasa aktuaris.

c) Usulan Hasil Analisis

Dari hasil analisis yang telah penulis lakukan pada PT. KAI (Persero) bahwa entitas telah melakukan pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian aset pajak tangguhan sudah sesuai dengan PSAK No. 46 dan buku teori khususnya tentang akuntansi pajak penghasilan, maka dalam hal ini penulis tidak menyampaikan usulan.

### Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis terhadap akuntansi aset pajak tangguhan pada PT. KAI (Persero) berupa adanya penambahan adanya penambahan saldo aset pajak tangguhan (*deffered tax assets*) pada periode berjalan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa PT. KAI (Persero) mengakui aset pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasi selama laba kena pajak masa depan tersedia untuk dimanfaatkan. PT. KAI (Persero) menyatakan bahwa laba kena pajak periode berikutnya yang diproyeksikan akan memadai. Dalam hal ini, pengakuan aset pajak tangguhan PT. KAI (Persero) telah memenuhi kriteria dan sesuai dengan PSAK No. 46.

PT. KAI (Persero) mengukur aset pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasi dengan tarif pajak yang berlaku sebesar 25% ketika jumlah tercatat atas aset (liabilitas) tersebut dapat dipulihkan (diselesaikan). Pengukuran aset pajak tangguhan PT. KAI (Persero) telah tepat dan sesuai berdasarkan PSAK No. 46.

PT. KAI (Persero) mencatat aset pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasi dalam pengukuran aset pajak tangguhan dan diketahui bahwa adanya saldo kenaikan aset pajak tangguhan yang timbul sebagai manfaat (beban) pajak tangguhan.

PT. KAI (Persero) menyajikan aset pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasi dalam laporan posisi keuangan sebagai aset tidak lancar. Sejalan dengan hal tersebut, manfaat (beban) pajak tangguhan disajikan di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Penyajian aset pajak tangguhan sudah sesuai dan tepat berdasarkan PSAK No. 46.

Dari hasil analisis yang telah penulis lakukan pada PT. KAI (Persero) bahwa entitas telah melakukan pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian aset pajak tangguhan sudah sesuai dengan PSAK No. 46 dan buku teori khususnya tentang akuntansi pajak penghasilan.

### Bibliografi

- Agoes, Sukrisno, dan Trisnawati, Estralita. (2013). *Akuntansi Perpajakan* (3rd ed.). Anggraeni, Irma. (2012). *Tinjauan Atas Penerapan PSAK No. 16 Tentang Aset Tetap pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kantor Pusat Bandung*. Universitas Widyatama.
- Ernawati, Rika, & Tjahjono, Achmad. (2018). *Analisis Perbedaan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Perpajakan Studi*

- Kasus pada PT Anindya Mitra Internasional*. STIE Widya Wiwaha.
- Fitriany, Lucy Citra, Nasir, Azwir, & Ilham, Elfi. (2016). *Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bei Tahun 2011-2013)*. Riau University.
- Hakim, Arif Rachmad, & Praptoyo, Sugeng. (2015). Pengaruh aktiva pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 4(7).
- Kurniasih, Tommy, & Sari, Maria M. Ratna. (2013). Pengaruh return on assets, leverage, corporate governance, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal pada tax avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*.
- Pratiwi, Oktarisa Dwi. (2019). *Penyusunan Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pada Koperasi Sawit Usaha Manunggal Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rangkuty, Dewi Mahrani, & Sari, Maya Macia. (2019). Analisis Utang Luar Negeri dan Inflasi Indonesia. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 19(1).
- Samsi, Marsya Indah Dwi, & Sulistyowati, Sulistyowati. (2020). *Pengaruh Aset Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
- Satrianto, Alpon. (2016). Analisis Determinan Defisit Anggaran dan Utang Luar Negeri di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 4(7).
- Tanuwijaya, Jessica, & Budiono, Doni. (2014). Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 238.
- Timuriana, Tiara, & Muhamad, Rezwan Rizki. (2015). Pengaruh aset pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 1(2), 12–20.
- Undang Undang. *tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan*. , Pub. L. No. 16 (2009).
- Waluyo. (2014). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 12). Jakarta: Salemba Empat.
- Weygandt, Kieso, dan Warfield. (2013). *Akuntansi Intermediate* (15th ed.). Jakarta: Erlangga.
- Widiastuti, Ni Putu Eka, & Chusniah, Elsa. (2011). Analisis Aktiva Pajak Tangguhan Dan Discretionary Accrual Sebagai Prediktor Manajemen Laba Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei. *Econosains Jurnal Online Ekonomi Dan Pendidikan*, 9(1), 28–40.
- Yocelyn, Azilia, & Christiawan, Yulius Jogi. (2012). Analisis pengaruh perubahan arus kas dan laba akuntansi terhadap return saham pada perusahaan berkapitalisasi besar. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 14(2), 81–90.



**This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).**